

Pers Dan Pemberitaan Sosial-Politik Orde Baru Dalam Sorotan Harian *Sinar Harapan* 1966-1986

Amalia Rusti Mutiara Dewi[✉] & Ba'in

Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Mei 2021
Disetujui Juni 2021
Dipublikasikan Agustus 2021

Keywords:
Pers, Kritik, Orde Baru

Abstrak

Pada awal periode pemerintahan Orde Baru, keberadaan pers di Indonesia sedang berada dalam fase penuh kebebasan. Kebebasan tersebut dipergunakan untuk melakukan konsolidasi kekuasaan oleh Presiden Soeharto. Beriringan dengan kebebasan pers, pemerintah dihadapkan pada situasi politik yang rumit. Sehingga artikel ini mengkaji tentang dinamika politik pada masa Orde Baru, dengan memfokuskan analisis kepada pemberitaan yang dilakukan oleh pers harian *Sinar Harapan* pada periode 1966 – 1986. Fokus kajian tertuju kepada maraknya kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang terjadi dalam badan pemerintah, seperti isu adanya SPRI; kasus BULOG; dan masalah proyek TMII yang menjadi sorotan pada penulisan berita oleh harian *Sinar Harapan*. Penulisan berita yang memuat kritikan tajam terhadap pemerintah ternyata tidak sedikitpun berhasil menggoyahkan kekuasaan rezim ini. Pemerintah Orde Baru justru melakukan tindak represif sebagai reaksi terhadap pemberitaan yang mengandung kritik tajam kepada pemerintah dengan melakukan pembungkaman kepada sejumlah pers yang kritis, salah satunya adalah harian *Sinar Harapan*.

Abstract

In the beginning of New Order period, the existence of Indonesian press has in experience full of freedom. The situations of liberaty is using by President Soeharto to consolidate his power. Along with the liberty of press, the government must faced with a complicated political situation. This article study about the political dynamics of the New Order government, by focusing analysis on news that been reporting by daily news Sinar Harapan in period 1966 – 1986. This study focus towards on rampant cases of KKN (Corruption, Collusion, and Nepotism) that's happened on agency of government, such as the issue of existence of SPRI; BULOG cases; and the problem of TMII projects which become main highlight on Sinar Harapan news. The news which containing criticism about the government did not destabilize this regime power. The New Order government precisely repressive actions as a reaction of news that containing sharp criticism about the government by silencing some press, which on is daily news Sinar Harapan.

© 2021 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:
Ruang Jurnal Sejarah, Gedung C5 Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: amaliarusti@students.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Jenderal Soeharto tampil dan unjuk diri sebagai pemimpin dalam masa Orde Baru. Masa dimana keadaan negara sedang dalam kekalutan yang luar biasa dalam berbagai hal, seperti krisis ekonomi, perdebatan politik, dan kekacauan sosial yang tersisa dari masa pemerintahan sebelumnya tepat pada pertengahan tahun 1960-an. Pergantian masa pemerintahan ini mendapatkan sambutan hangat yang penuh suka cita dari berbagai kalangan masyarakat, salah satunya dari kalangan pers yang dimana pada masa Orde Lama telah banyak mengalami pegekangan dan pembatasan aktivitas penerbitan berita. Pemerintahan baru ini diharap-harap masyarakat nantinya akan mampu membawa negara ke dalam perubahan yang hebat (*Poesponorogo & Noto-susanto*, 1991: 56).

Kelahiran Orde Baru sendiri bukan dari sebuah peristiwa biasa melainkan melalui banyak drama dan kejadian sehingga melahirkan sebuah kepemimpinan baru (Suwirta, 2018: 114). Dimana terjadi perubahan besar sebuah orientasi kepemimpinan seperti dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks ini Presiden Soeharto mulai menata kembali bentuk pemerintahannya dengan melakukan konsolidasi ideologi kepemimpinannya. Penataan tersebut terjadi pada rentang waktu antara 1966 – 1974 (Mas'ood, 1989: 145).

Berakhirnya masa pemerintah Orde Lama (1959 – 1966) telah menyisakan banyak masalah yang harus diselesaikan satu persatu oleh Presiden Soeharto. Dalam rentang waktu 1966 – 1974 pemerintah Orde Baru mulai melakukan banyak pembenahan untuk mengatasi kekacauan sisa pemerintah sebelumnya. Tahap pertama yang diambil oleh pemerintah adalah melakukan konsolidasi kekuasaan dengan menata aliansi dalam badan tubuh pemerintahannya. Penataan tersebut guna memperkenalkan dirinya sebagai kekuatan politik yang solid dan bukan lagi sebagai kekuatan militer (*cf* McDonald, 1980: 104).

Disamping konsolidasi kekuasaan secara internal, pemerintah juga melakukan pembangunan sekaligus penanaman ideologi dari pemerintah Orde Baru sendiri. Mereka mulai

melakukan propaganda penanaman nilai-nilai modernisasi dan pengembangan ideologi pembangunan. Mayor Jenderal Ali Moertopo, sebagai salah satu kaum intelektual yang memiliki kedekatan dengan Presiden Soeharto ternyata mulai menanamkan pemahaman mengenai konsep pembangunan nasional (Suwirta, 2018: 114).

Strategi pembangunan nasional tersebut tidak hanya meliputi pembangunan ekonomi, melainkan tentang penekanan mengenai masalah ketertiban versi pemerintah. Pembangunan ini sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi versi pemerintah yang meliputi pembuatan kebijakan secara rasional, efisien, efektivitas, dan pragmatisme (Mas'ood, 1989: 145).

Selain pembangunan nasional, pemerintah Orde Baru juga memiliki sebuah prinsip dasar, yaitu keberadaan rezim sekarang merupakan sebuah pembaharu dan bukan hanya sekedar menggantikan rezim sebelumnya. Presiden Soeharto menawarkan stabilisasi dan pembangunan sebagai tujuan utama yang akan dicapainya. Untuk mewujudkan itu, akhirnya Presiden Soeharto memutuskan untuk membentuk sebuah kabinet yang dinamakan “Kabinet Pembangunan” (Khoir, 2014).

Dalam melakukan stabilisasi ekonomi, pemerintah Orde Baru dihadapkan pada warisan dari pemerintah sebelumnya, seperti besarnya hutang luar negeri, jatuhnya nilai ekspor, kerusakan infrastruktur, dan inflasi yang mencapai angka 650% (Pujoalwanto, 2014). Dengan kata lain perbaikan tersebut sama saja halnya dengan melakukan pembangunan ekonomi dari nol lagi. Bagi rezim Orde Baru hal ini tentunya bukan hal yang mudah mengingat umur pemerintah terbilang masih muda. Menghadapi kesulitan dalam mengatasi pembangunan ekonomi dari awal, Presiden Soeharto mempercayakan tugas untuk merancang dan melakukan pembangunan ekonomi secara bertahan kepada kelompok teknokrat dari UI (Suwirta, 2018: 115).

Akan tetapi karena memang sejak awal kepemimpinan Presiden Soeharto sudah terjadi dualism kepemimpinan, terjadilah sebuah bentrok antara kaum intelektual dari kalangan menteri dengan para perwira TNI-AD yang memiliki

kedekatan khusus dengan Presiden Soeharto (Mas'oeed, 1996: 29)

Setelah memasuki tahun 1966, keberadaan prajurit TNI-AD mulai terasa lebih dominan di dalam urusan politik dan pemerintahan. Hal tersebut terjadi karena anggapan terhadap kegagalan kondisi politik Indonesia ketika berada pada pihak sipil (Crouch, 1999:156). Para prajurit TNI-AD percaya bahwa adanya campur tangan pihak militer dalam dunia politik akan mampu menciptakan sebuah kestabilan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi.

Tahun-tahun pertama Orde Baru lahir, ternyata memberikan keleluasaan pihak militer untuk ikut campur dalam bidang politik. Dalam hal ini dapat terlihat dengan jelas adanya kedekatan antara Presiden Soeharto dengan para prajurit, kedekatan tersebut memunculkan istilah "Jenderal-jenderal Politik dan Uang" dimana para prajurit diberikan kebebasan untuk melakukan perluasan kekuasaan mereka dalam mencari sebuah jabatan (Crouch, 1999: 175).

Campur tangan pihak militer dapat dilihat dari banyaknya urusan politik negara yang dipertugaskan kepada para prajurit. Seperti Deputy Panglima TNI-AD yang dijabat oleh Letnan Jenderal Maraden Pangabean, begitu pula dengan posisi Menteri Dalam dan Luar Negeri yang dijabat oleh Mayor Jenderal Basuki Rahmat. Bukan hanya itu, penguasaan minyak dan barang tambang (PERTAMINA) juga dipercayakan kepada salah satu anggota militer, yaitu Mayor Jenderal Ibnu Sutowo, begitu pula dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) yang dipercayakan kepada Brigadir Jenderal Achmad Tirtosudiro yang masih merupakan anggota militer negara (Crouch, 1999: 250 – 269).

Akan tetapi untuk menutupi tingkat dominasi para prajurit militer dalam pemerintah Orde Baru, Presiden Soeharto juga mengikutsertakan warga sipil sebagai bentuk pemanfaatan keahlian dan pengalaman mereka. Alih-alih memanfaatkan keahlian, tujuan dasar Presiden Soeharto mengikutsertakan pihak sipil sebenarnya adalah untuk menciptakan pandangan positif para negara Barat terhadap pemerintah Orde Baru yang bersifat demokratis

dan menjamin hak-hak warga sipilnya (Rajab, 2004: 189).

Jelas bukan suatu tugas yang mudah bagi Jenderal Soeharto untuk menjabat sebagai Presiden Indonesia pada masa-masa awal Orde Baru. Banyak pihak, terutama dari perwira-perwira tentara sendiri yang tidak menyukai kemunculannya begitu cepat dalam kekuasaan, dan ditakutkan akan menjadi penentang yang kuat. Adapun dari kalangan mahasiswa yang tidak puas dengan gaya pemerintahan Jenderal Soeharto, yang memberikan kesan sikap alon-alon waton kelakon (pelan-pelan tetapi tercapai tujuan), dalam merespons masalah-masalah politik dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Proses konsolidasi kekuasaan dan mencari legitimasi politik yang kuat ini menjadi masa-masa yang cukup kritis bagi pemerintahan Orde Baru pada akhir tahun 1960 – an dan awal tahun 1970-an. (Suwirta, 2018: 117).

METODE

Artikel dengan menggunakan metode historis ini, mengkaji tentang pasang-surut politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru (1966 – 1986), dengan memfokuskan analisis mengenai pers dan kritik sosial terhadap pemerintah Orde Baru.

Tahap pertama yang dilakukan adalah heuristic, yaitu pencarian data dan sumber informasi primer yang memiliki keterkaitan dengan fenomena terkait isu kasus KKN pada masa Orde Baru. Sumber primer yang digunakan adalah surat kabar sezaman khususnya surat kabar harian *Sinar Harapan*, arsip pemerintah yang tidak lain adalah undang-undang ketentuan tentang pokok pers, dan juga penggunaan sumber seperti skripsi; artikel; buku; dan juga jurnal.

Setelah itu penulis melakukan kritik sumber atau verifikasi data dengan melakukan perbandingan isi dari sumber-sumber yang sudah ada. Seperti mengoreksi dan melakukan pengecekan terhadap keaslian surat kabar yang tersedia. Setelah itu penulis melihat isi surat kabar *Sinar Harapan* kemudian melakukan perbandingan isi pada surat kabar lainnya.

Langkah selanjutnya adalah interpretasi, dalam tahap ini penulis melakukan analisis

sejarah sehingga mengetahui dan memahami konteks permasalahan yang terjadi antara pemerintah dengan pers harian *Sinar Harapan*, yakni kepentingan mereka saling bertentangan satu sama lain.

Tahap terakhir, historiografi, pemahaman dan interpretasi akan atas fakta sejarah akan ditulis menjadi sebuah kisah yang menarik dan logis. Dengan demikian konteks ini akan menarik apabila mengkaji tentang profil dan kelahiran media pers *Sinar Harapan* ditengah kelahiran sistem pemerintah Orde Baru; bagaimana media pers ini memberitakan praktek-praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) selama tahun 1966 – 1986; dan mencari tahu bagaimana reaksi pemerintah Orde Baru terhadap sikap kritis Harian *Sinar Harapan* dalam mengangkat masalah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Surat Kabar Harian *Sinar Harapan*.

Kelahiran pers harian *Sinar Harapan* berada pada saat kondisi pers di Indonesia sedang dalam masa penuh kebebasan, tepatnya saat pemerintah menganut system demokrasi liberal. Dengan kata lain, siapapun yang memiliki modal maka dapat melakukan penerbitan berita (Sjahril & Sjureich, 1971: 127). Alih-alih memberikan kebebasan, tujuan pemerintah sebenarnya adalah untuk mendapatkan sejumlah informasi politik Indonesia yang masih di dominasi oleh Politik Belanda & Cina (Suwirta, 2008: 263).

Kehidupan pers yang penuh kebebasan ternyata tidak berlangsung lama, kebebasan itu hanya dirasakan pada awal-awal kemerdekaan hingga akhir tahun 1960 (C. Smith, 1986: 243). Memasuki tahun-tahun kontrol pers, salah satu anggota dari Partai Kristen Indonesia yang bernama Komang Makes (dokter Angkatan Laut berpangkat Mayor) memiliki sebuah ide gagasan untuk mendirikan sebuah lembaga yang nantinya akan dipergunakan untuk menyalurkan aspirasi dan suara pemikiran masyarakat dengan perwakilan dari umat beragama Kristen.

Komang Makes sendiri ternyata memiliki kedekatan dengan tim dari percetakan PT. Kinta. Dimana fasilitas disana dihibahkan semua

kepada Makes pasca adanya pembreidelan di *Pos Indonesia* (Seno, 2003: 223). Untuk mengelola perusahaan yang akan dibentuknya nanti, Makes mencari dan akhirnya menunjuk HG Rorimpandey sebagai kepala redaksi. Rapat keberlangsungan pembentukan surat kabar ini dilakukan secara bergantian, dengan hasil rapat telah menetapkan nama pada surat kabar harian ini dengan nama *Sinar Harapan* atas usulan dari Makes. Surat kabar ini memiliki motto “Memperjuangkan Kemerdekaan dan Keadilan, Kebenaran dan Perdamaian Berdasarkan Kasih” yang disusun oleh Rumambi.

Walaupun pendiri surat kabar harian *Sinar Harapan* ini mayoritas berasal dari kalangan pendeta dan tokoh gereja, akan tetapi penulisan berita yang diterbitkan tidak hanya membahas masalah golongan mereka dan tetap melakukan penulisan berita sebagai media aspirasi masyarakat Indonesia yang beragam (Katoppo, 1994: 155).

Harian *Sinar Harapan* memiliki edisi perdana berjumlah 7.500 eksemplar yang beredar pada Kamis sore, 27 April 1961 (Sihar A & Karel S, 2008: 973). Susunan dewan redaksi pertama terdiri dari lima orang, yakni J.C.T Simorangkir sebagai penanggung jawab sekaligus kepala redaksi, HG. Rorimpandey sebagai pimpinan umum, dan dibantu oleh Seohardi, B Simorangkir, dan juga Soesilo berhasil melambungkan jumlah eksemplar pada akhir tahun 1961 dengan jumlah sebanyak 25.000 eksemplar (Seno, 2003: 227).

Seiring dengan perkembangan waktu, *Sinar Harapan* terus berkembang hingga menjadi koran nasional terkemuka dengan julukan “raja koran sore”. Dapat dilihat perkembangan dan penambahan karyawan yang semula berjumlah 28 orang pada tahun 1961 dan menjadi 451 orang pada tahun 1986 (*Sinar Harapan.co.id*).

Sinar Harapan dicatat menerima berbagai penghargaan, antara lain tropi Adinegoro dari PWI pada tahun 1975 untuk wartawan Subekti, 1976 untuk wartawan Panda Nababan, dan 1979 untuk wartawan Yuyu A.N Mandaige dengan kategori penulisan terbaik. Tahun 1976 Tajuk Rencana *Sinar Harapan* mendapat penghargaan berupa Kalam Kencana dari Departemen

Penerangan. Tahun 1982, Bernadus Sendouw meraih trofi Adinegoro dalam bidang foto. Kemudian pada tahun 1983 *Sinar Harapan* memborong 5 trofi Adinegoro yaitu bidang P4 oleh Suryanto Kodrat, karikatur oleh Pramono, foto oleh Indrarondonuwu, berita luar negeri oleh Samuel Pardede, dan penghargaan terhadap Tajuk Rencana. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 1984 *Sinar Harapan* Kembali mendapat penghargaan dalam bidang karikatur oleh Pramono dan Tajuk Rencana. Tahun 1985 *Sinar Harapan* kembali mendapatkan 4 trofi Adinegoro, yaitu 2 buah untuk foto oleh Tinnes Sanger dan Bernadus Sendouw, dan 2 buah untuk karikatur oleh Pramono dan Thomas Lionar. Terakhir pada tahun 1986 sebelum terjadi pembredelan pers *Sinar Harapan* meraih juara I sebagai surat kabar Ibukota yang unggul dalam pemberitaan mengenai pembangunan DKI Jakarta dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sepanjang tahun 1985 (*Sinar Harapan.co.id*, 2015).

Harian *Sinar Harapan* dinilai pandai mencari informasi, mereka cenderung bersikap cerdas dalam menyiasati penulisan berita yang cenderung kasar tapi tetap aman. Dalam pembangunan Indonesia kembali dari dasar, pasti banyak sekali permasalahan yang muncul dan bisa dijadikan sorotan untuk penulisan berita harian. Bentuk penulisan berita harian yang dipilih oleh *Sinar Harapan* biasanya berupa kritik sosial terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang pada awalnya bertujuan untuk memajukan perekonomian Indonesia dan justru kemudian malah menjadi sebuah isu-isu yang melenceng dari jalan awalnya (T. Hill, 2011: 102).

Seruan Berita dan Kritik Sosial Politik oleh Pers Harian *Sinar Harapan*.

Semenjak bergantinya kepemimpinan, pers Indonesia telah berfungsi sebagai sarana untuk mengungkapkan aspirasi kebangsaan maupun sebagai ajang agitasi politik (T. Hill, 2011: 20). Dalam masa pemerintahan orde baru, harian *Sinar Harapan* merupakan pers independent yang kritis. Selama periode kedua harian *Sinar Harapan* (sehabis pembredelan pertama 1965), media ini lebih berfokus pada

model pemberitaan kasus korupsi yang lebih dinamis.

Pada masa awal pemerintahan, isu korupsi hampir tenggelam, akan tetapi hal tersebut bukan berarti korupsi tidak ada. Dalam penulisan berita, harian *Sinar Harapan* menyoroti kasus korupsi pada lembaga-lembaga dan program pemerintah seperti Bulog, Pertamina, Bea Cukai dan lain-lain (Hamid & Sayuti, 1999: 80).

Pertama, Tentang Isu Pembentukan SPRI (Staff Pribadi Presiden). Seperti pembahasan sebelumnya bahwa sudah terlihat adanya sebuah dualisme kepemimpinan pada masa awal pemerintah Orde Baru, yaitu Presiden Soeharto memberikan kepercayaannya kepada para pembantu resmi dalam kabinet (Jenkins, 2010: 56), selain itu ia juga memberikan kepercayaannya kepada SPRI (Staff Pribadi) yang beranggotakan perwira – perwira TNI-AD yang memiliki kedekatan dengan presiden Soeharto (Vatikoitis, 1998: 76).

Dalam pandangan pers Lembaga SPRI bukanlah kabinet pembantu presiden melainkan “kabinet bayangan” yang memiliki dominasi lebih terhadap pengaruh dalam pembangunan nasional (Raillon, 1985: 42). Kritik sosial pun banyak dilontarkan untuk SPRI, untuk menghadapi itu lembaga tersebut dibubarkan untuk sementara lalu kemudian dilakukan pengangkatan kabinet baru pada tahun 1968 (Rahmat, 2011: 44).

Keberadaan asisten-asisten pribadi Presiden ini, telah membuka lebar peluang untuk melakukan hubungan bisnis antara para pengusaha Cina dan orang-orang Jepang. Muncul sebutan baru untuk ASPRI yaitu “Jenderal Politik dan Uang” tidak membuat mereka jera akan kritik-kritik sosial yang tajam dari berbagai pihak, salah satunya adalah kritikan tajam dari harian *Sinar Harapan* (Crouch, 1999: 89).

Kedua, Performa Kerja BULOG (Badan Urusan Logistik). Memasuki tahun 1970-an, terlihat adanya pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik dilihat dari hasil-hasil dari pembangunan ekonomi yang pertama walaupun belum sepenuhnya cita-cita para pembaharu

ekonomi terwujud sepenuhnya (Raillon, 1985: 56).

Masalah utama yang menjadi pembahasan dari pers harian *Sinar Harapan* adalah seputar pendistribusian besar yang menggambarkan kegagalan BULOG (Ali, 1986: 89). Pendirian BULOG sendiri pertama kali dilakukan oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1966 (Ashari, 2015: 103). Mula-mula pembentukan badan ini bertujuan untuk memberikan sebagian gaji para pegawai negeri dalam bentuk bahan pangan berupa beras (Nasution, 2016: 68).

Akan tetapi setelah keluarnya keputusan Presiden No. 11 Tahun 1969, BULOG beralih fungsi menjadi alat untuk menstabilkan harga bahan pangan sekaligus berwenang dalam mengelola administrasi bantuan dana dari luar negeri. Hal inilah yang menjadi penyebab adanya monopoli perdagangan (Nasution, 2016:69).

BULOG mendapat julukan sebagai "Komando Logistik Nasional" karena mayoritas anggotanya berasal dari kalangan perwira TNI-AD. (Crouch, 1999: 137). Keberadaan BULOG sendiri bagi para perwira merupakan sebuah lembaga penting untuk mencari anggaran dari luar pemasukan minyak milik negara. Anggaran tersebut dipergunakan untuk menutupi kekurangan anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah (Samego, 1998: 48).

Harian *Sinar Harapan* mengeluarkan artikel berita dengan judul "*Masih Perlu Impor Beras Sebanjak 500 Ribu Ton*", yang di dalamnya terdapat kritik besar terhadap kinerja badan logistik yang tidak mampu melakukan peranannya dengan baik, melainkan justru menjadi penghambat laju perdagangan beras rakyat dengan melakukan impor beras secara besar-besaran.

Harian ini menilai bahwa dalam melakukan pekerjaannya, badan logistik tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, malah sebaliknya badan logistik banyak melakukan penghambatan terhadap jalannya mekanisme perdagangan beras yang sehat dan justru memberikan kerugian besar terhadap petani dan produsen beras lokal (Ashari, 2015: 107).

Harian *Sinar Harapan* juga menilai bahwa BULOG sering melakukan spekulasi pasar hanya untuk kepentingan para pejabatnya sendiri. Padahal dalam beroperasi badan logistik mendapatkan biaya operasional dari Bank Indonesia secara kredit dan biaya tidak masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan juga mendapatkan jaminan dari Departemen Keuangan secara terpisah (Mas'ood, 1989: 167).

Pemerintah Orde Baru semakin menunjukkan ketidak berhasilan badan logistik dalam melakukan stabilisasi harga-harga bahan kebutuhan pokok melalui kegagalan pengadaan beras pada tahun 1969 (Ashari, 2015: 116). Kegagalan tersebut terulang pada tahun 1972, dimana badan logistik lagi-lagi tidak mampu mencukupi ketersediaan bahan pokok yang berakibatkan pada melonjaknya angka inflasi yang tinggi (Ali, 1986: 68).

Ketiga, Isu Proyek Pembangunan TMII (Taman Mini Indonesia Indah). Memasuki tahun 1972, Ibu Tien Soeharto memberikan gagasan untuk pembangunan sebuah tempat karya wisata, dimana pembangunan tersebut menurut beberapa kalangan tidak begitu dibutuhkan mengingat keadaan ekonomi negara yang sedang mengalami kejatuhan (Elson, 2001: 56).

Kejatuhan ekonomi tersebut merupakan oleh-oleh dari tahun sebelumnya akibat kegagalan BULOG dalam melakukan operasional kerjanya. Sehingga muncul berbagai bentuk protes mengenai pembangunan TMII. Gerakan-gerakan yang dilakukan mahasiswa antara lain: "Gerakan Penghematan"; "Gerakan Akal Sehat"; dan "Gerakan Penyelamat Uang Rakyat" (Aly, 2004: 93).

Dalam hal ini, harian *Sinar Harapan* turut mendukung gerakan-gerakan tersebut dengan menuliskan berita yang berisi kritikan keras terkait isu rencana proyek pembangunan TMII. Menurut pandangan Jenderal Soemitro, seorang PANGKOPSKAMTIB (Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban), proyek pembangunan TMII dianggap tidak tepat untuk keadaan negara dan sangat bertentangan dengan kepentingan negara saat ini, karena menurutnya pembangunan tersebut memerlukan biaya yang

terlampau mahal dan tidak adanya kejelasan cara mereka memperoleh dana (Siregar, 1994: 83).

Isu pembangunan proyek taman mini yang melahirkan aksi protes ternyata dinilai sudah termasuk kedalam gerakan radikalisme oleh mahasiswa. Harian *Sinar Harapan* dalam hal ini telah mencorakkan semangatnya dalam bentuk kritikan sosial dan mendukung adanya aksi protes mahasiswa kepada pemerintah Orde Baru. Bersamaan dengan akumulasi beberapa kekecewaan lainnya terhadap pemerintah, aksi protes ini menjadi pemicu kelahiran gerakan mahasiswa yang bersifat massif dan radikal, yaitu Malapetaka 15 Januari tahun 1974, dan harian *Sinar Harapan* juga terkena imbasnya, yakni dibredel dan diberhentikan paksa untuk sementara (Yogaswara, 2009: 114).

Reaksi Pemerintah Terhadap Kritis Pemberitaan oleh Harian *Sinar Harapan*.

Pada tahun-tahun awal kelahiran Orde Baru, pers harian *Sinar Harapan* melakukan unjuk diri sebagai salah satu pendukung sekaligus penegak bagi kelahiran rezim baru ini (Surjomiharjo, 2002: 56). Pada awal pemerintahan, aktivitas pers mengalami perkembangan yang sangat pesat setelah sekian lama mengalami pengekangan, terutama pada masa Orde Lama (1959 – 1965), dimana pers benar-benar tidak memiliki kebebasan (Lee, 1971: 43).

Pers *Sinar Harapan*, yang muncul pada tahun 1961 dan lahir dengan tujuan menyuarakan isi hati rakyat ini menjadi salah satu koran yang berani mendobrak dan mengkritisi pemerintah pada masa itu, yakni pemerintahan Orde Lama dibawah kepemimpinan presiden Soekarno (Raillon, 1985). Pada masa pemerintahan ini surat kabar lainnya cenderung lebih memilih untuk diam dan bungkam, sedangkan pers *Sinar Harapan* memilih untuk bergerak dalam memberikan kritik terhadap pemerintah (Hill, 2011: 65). Hal inilah yang menjadi alasan adanya pembredelan pada pers harian *Sinar Harapan* pada tahun 1965.

Memasuki pergantian pemerintah pers ini juga turut berpartisipasi dalam menuliskan citra baik para perwira TNI-AD yang sedang mencari

kursi kekuasaan (Wibisono, 1980: 60 – 63). Pada awalnya pers ini dianggap menguntungkan bagi pemerintah karena ikut andil dalam mempropagandakan rezim baru dengan ideologinya yang bersifat “Pembangunan Sentris” (Raillon, 1985: 89 – 91).

Sejalan dengan berjalannya waktu, yakni tepatnya pada akhir tahun 1967, harian *Sinar Harapan* merasa bahwa dalam birokrasi dan pemerintah Orde Baru ada sebuah perilaku yang dinilai salah. Praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dirasa sangat sering terjadi pada pemerintah Orde Baru (Raillon, 1985: 85 – 91). Menanggapi hal tersebut harian ini menuliskan berbagai berita yang berisi kritikan tajam untuk pemerintah, berita tersebut memuat kasus kotor yang dilakukan oleh oknum-oknum perwira TNI-AD (Raillon, 1985: 101 – 103).

Pada awal mulanya Presiden Soeharto melakukan penahan diri untuk tidak terpengaruh akan kritikan tajam tersebut mengingat pemerintahan baru berjalan sebentar dan menganggap kritikan tersebut sebagai bentuk masukan untuk memperbaiki era kepemimpinannya (Abar, 1995: 69).

Tetapi memasuki tahun 1972, dimana muncul isu pembangunan TMII sedang merebak, seperti yang sudah dibahas di atas, secara perlahan respon pemerintah Orde Baru terhadap pers berubah (Abar, 1995: 73). Adanya isu proyek TMII ini ternyata secara tidak langsung memunculkan sikap kritis dan populis, dan juga memunculkan keberanian dari pihak pers dalam mengungkapkan dan menyampaikan suara-suara ketidakpuasaan masyarakat (Surjomiharjo, 2002: 74).

Memasuki tahun 1973, kebebasan pers yang telah dijanjikan oleh pemerintah akhirnya harus pupus ditengah jalan. pemerintah Orde Baru telah banyak bertindak keras terhadap keberadaan pers di Indonesia. Dimulai dengan adanya pencabutan untuk SIT (Surat Ijin Terbit) bagi beberapa pers yang beredar salah satunya adalah harian *Sinar Harapan* yang dianggap meleakukan pembocoran rahasia negara terkait RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 1973 – 1974, yang secara resmi masih belum diumumkan oleh pemerintah.

Sikap keras pemerintah bertambah sejak adanya peristiwa MALARI (Malapetaka 15 Januari), yang dinilai telah menyebabkan kericuhan masal antara pemerintah dan masyarakat. Tepat sebelum terjadinya peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 itu, ada beberapa surat kabar yang menuliskan berita tentang sebuah acara, yaitu *tirakatan* (tradisi Jawa untuk berpuasa dan tidak tidur sepanjang malam) yang dihadiri oleh Hariman Siregar selaku Ketua Dewan Mahasiswa UI (Universitas Indonesia), dan Hatta Albanik, selaku Ketua Dewan Mahasiswa UNPAD (Universitas Padjajaran); yang menyatakan dan sepakat untuk melakukan pergerakan dan perlawanan. Pemerintah menganggap berita tersebut telah memicu peristiwa yang tidak diinginkan (Buletin *Mahasiswa Indonesia*, Edisi Januari 1974).

Pemerintah akhirnya mengambil jalan pintas dengan bertindak secara represif dengan membredel 10 surat kabar harian, 8 majalah dan tabloid mingguan, serta 3 stasiun radio. Baik SIT (Surat Ijin Terbit) ataupun SIS (Surat Ijin Siaran), yang merupakan legalisasi untuk berkomunikasi dengan masyarakat, untuk sementara atau selamanya terpaksa dicabut oleh pemerintah. Pers harian *Sinar Harapan* sendiri justru dibredel setelah pasca kejadian empat tahun lalu, yaitu pada tanggal 20 Januari 1978 surat ijin penerbitannya dicabut untuk sementara, dan mulai terbit kembali pada tanggal 4 Februari 1978 (*Sinar Harapan.co.id*, 2015).

Setelah mendapatkan surat ijin terbit kembali, pers harian ini kembali memberikan kritikan tajamnya terhadap pemerintah terkait kebijakan devaluasi. harian *Sinar Harapan* mengeluarkan berita utama *headline* di halaman depan yang berjudul "Pemerintah akan cabut 44 SK Tata Niaga Bidang Impor". Akibat dari adanya pemberitaan diatas pada hari Kamis, 9 Oktober 1986 harian *Sinar Harapan* tidak diizinkan terbit lagi, dan dibatalkan SIUPP-nya (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers). Pembatalan SIUPP harian *Sinar Harapan* yang diterbitkan di Jakarta tersebut dinyatakan dalam surat keputusan Ditjen PPG/K/1986, yang ditandatangani Dirjen pembinaan pers dan

grafika, Sukarno SH, atas nama Menteri Penerangan.

Berita mengenai pembredelan dan pencabutan SIUPP harian *Sinar Harapan* diterbitkan oleh harian *KOMPAS* lusa sehabis terjadinya pencabutan tersebut, tepatnya pada tanggal 11 Oktober 1986 dengan artikel berjudul "SPS dan PWI Prihatin atas Kasus "Sinar Harapan".

SIMPULAN

Pemerintah Orde Baru merupakan golongan politik pembaharu yang kemunculannya memiliki tujuan untuk membangun perekonomian Indonesia kearah yang lebih baik. Pada masa ini juga pers akhirnya bisa merasakan sebuah kebebasan yang tidak dapat dirasakan pada masa pemerintah Orde Lama.

Dalam konteks ini, harian *Sinar Harapan* banyak memberikan pandangan masyarakat terhadap pemerintah. Bukan hanya sebagai media penyalur aspirasi, pers ini juga melakukan berbagai kritik dengan tujuan memberikan masukan kepada pemerintah terkait kasus KKN.

Akan tetapi, kritik yang disampaikan justru dinilai membahayakan bagi pemerintah, sehingga akhirnya pemerintah mengambil jalan pintas yaitu dengan cara pembredelan.

DAFTAR PUSTAKA

TERBITAN RESMI PEMERINTAH

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1966

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982

SUMBER SURAT KABAR

Sinar Harapan tahun 1969, 1970, 1972, 1974, 1986

Kompas tahun 1974, 1986

SUMBER BUKU

Abar, Akhmad Zaini. 1974. *Kisah Pers Indonesia 1966 – 1974*. Yogyakarta: LKIS

Ali, Fachry et al. (1986). *Beras, Koperasi, dan Politik Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Aly, Rum. (2004). *Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter: Gerakan Kritis Mahasiswa Bandung di*

- Panggung Politik Indonesia, 1970 – 1974*. Jakarta: Penerbit Kompas
- Ashari, Fauzan Adi. 2015. *Pasang Surut Sejarah di Indonesia pada Tahun 1967 – 1998*. Jember: Universitas Negeri Jember
- Crouch, Harold. 1999. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mas'ood, Mohtar. (1996). "Lembaga Kepresidenan dan Resep Pengendalian Politik di Indonesia" dalam Risa Noer Arfani [ed]. *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Mas'ood, Mochammad Mochtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966 – 1971*, (Jakarta: LP3S, 1989).
- McDonald, H. (1980). *Suharto's Indonesia*. Blackburn, Australia: Fontana Books
- Poesponsorogo dan Notokusumo. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pujoalwanto, Basuki. 2014. *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Raillon, Francois. 1985. *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru, 1966 – 1974*. Jakarta: LP3ES.
- Rajab, Budi. 2004. Negara Orde Baru: Berdiri Di Atas Sistem Ekonomi dan Politik Yang Rapuh. Dalam *Jurnal Sosialhumaniora*. Vol.6, No. 3. Hlm. 189.
- Samego, Indira. 1998. *Bila ABRI Berbisnis*. Bandung, Penerbit Mizan.
- Suwirta, Andi. 2008 *Dinamika Kehidupan Pers di Indonesia pada Tahun 1950 – 1965: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Nasional*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Suwirta, Andi. 2018. *Pers dan Kririk Sosial Pada Masa Orde Baru: Studi Kasus Pers Mingguan Mahasiswa Indonesia di Bandung, 1966 – 1974 Vol. 3 No. 2*. Bandung: Mimbar Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.
- T, Sjahril & M. Sjureich. 1971., *Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia*. Jakarta: SPS [Serikat Penerbit Surat kabar] Pusat.

SUMBER WEBSITE

- SinarHarapan.co.id*
Surat Kabar di Indonesia. Diakses dari <http://kompasiana.com/fachrulkhairuddin>. pada 10 Januari 2021